

Quo Vadis Diplomasi Multilateral *Middle Power*: Eksplorasi Restrukturisasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Dewan Keamanan PBB Era Presiden Joko Widodo

Quo Vadis of Middle Power's Multilateral Diplomacy: Exploration of Indonesia's Foreign Policy Restructurization in UN Security Council Under President Joko Widodo

Hino Samuel Jose^{*}, Laode Muhamad Fathun^{}, Wiwiek Rukmi Dwi Astuti^{***}**

^{*}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

^{*}abrahamhinosamueljose@upnvj.ac.id, ^{**}laodemuhamadfathun@upnvj.ac.id,

^{***}wiwiek.rukmi@upnvj.ac.id

Abstract

Indonesia's foreign policy is constantly changing from time to time following the time and maturing process of Indonesia's foreign policy from an autocratic to a more democratic era. The challenge, of course, remains given that Indonesia's position as a middle power country must face political tug-of-war with major powers in international institutions such as the United Nations. There is an urgency to identify how the process of Indonesia's foreign policy restructuring is carried out as an effort to maintain the continuity of Indonesia's role as a middle power country in multilateral forums. In this study, the multilateral forum being discussed is the UN Security Council (UNSC) as the highest political forum that produces legally binding decisions on international law. This research was conducted using the theory of restructuring the foreign policy model from Holsti with the concept of middle power as the theoretical framework. Qualitative research method is used based on data from scientific sources and the author's observations on the implementation of Indonesia's membership in the UN Security Council in 2019 - 2020. This study concludes that there is a positive correlation in the analysis of the convergence of restructuring of middle power countries with what Indonesia experienced in the process as a non permanent member of the UN Security Council in the era of President Joko Widodo that has its own diplomatic character.

Keywords: Restructurization, Middle Power, UN Security Council, Bridgebuilder, Multilateral Diplomacy.

Abstrak

Kebijakan luar negeri Indonesia senantiasa berubah dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan zaman dan semakin dewasanya politik luar negeri Indonesia di bawah berbagai era kepemimpinan dari era yang lebih otokratis menuju era yang lebih demokratis. Tantangan tentunya tetap ada mengingat posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah (*middle power*) harus menghadapi tarik ulur politik dengan negara berkekuatan besar (*major power*) dalam institusi internasional seperti PBB. Terdapat urgensi untuk mengetahui bagaimana proses perubahan struktur (restrukturisasi) kebijakan luar negeri Indonesia dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan peran Indonesia sebagai negara *middle power* pada forum multilateral. Pada penelitian ini, forum multilateral yang menjadi pembahasan adalah Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang merupakan forum politik tertinggi yang menghasilkan keputusan yang mengikat secara hukum internasional. Penelitian ini sendiri dilakukan menggunakan teori restrukturisasi model kebijakan luar negeri dari Holsti dengan konsep *middle power* sebagai kerangka berpikir penelitian. Metode yang dilakukan adalah studi kualitatif dari sumber – sumber ilmiah dan observasi penulis pada pelaksanaan keanggotaan Indonesia di DK PBB tahun 2019 – 2020. Penelitian ini menyimpulkan adanya korelasi

positif dalam analisis konvergensi restrukturisasi negara *middle power* dengan apa yang dialami oleh Indonesia dalam prosesnya sebagai anggota tidak tetap DK PBB pada era Presiden Joko Widodo yang memiliki karakter diplomasinya sendiri.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Kekuatan Menengah, DK PBB, Pembangun Jembatan, Diplomasi Multilateral.

Pendahuluan

Aktor negara berperan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan global baik dalam mendorong implementasi rezim global¹. Dalam prosesnya, dengan beragamnya status dan kekuatan yang dimiliki negara, maka interaksi dalam forum multilateral seperti PBB akan terus di pengaruhi baik dari keinginan mereka untuk berinteraksi/ menjadi penahan kepentingan negara besar dalam proses pembahasan isu yang mungkin sensitif, maupun juga untuk bersikap netral dan tidak berminat untuk memperluas gesekan mereka dengan negara besar². Dengan keamanan internasional yang memiliki dua jenis situasi yaitu perdamaian positif dan negatif³, setiap negara akan terus menyesuaikan kebijakan luar negerinya sebagai upaya kontrol pengaruh eksternal ke domestik⁴. Hal ini merupakan upaya refleksi merefleksikan kepentingan domestik dalam sikap mereka di level internasional untuk melaksanakan orientasi kebijakan luar negeri yang di ambil⁵. Tidak melulu *soft power*, negara *middle power* juga lebih fokus pada penggunaan kekuatan untuk mencapai kepentingan melalui posisi tawar dan tidak untuk akumulasi militer semata⁶.

Kemudian, ketika berbicara terkait polugri para aktor negara di forum multilateral, maka harus ada klasifikasi berbasis kekuatan yang perlu dilakukan untuk menentukan pola interaksi mereka dalam isu global. Pembagian yang digunakan adalah negara kekuatan besar (*great power/ major power*), kekuatan menengah (*middle power*), dan kecil (*small power*)⁷. Dalam konteks multilateral, para aktor negara yang memiliki karakter dan tingkat kekuatan yang berbeda yang kemudian membentuk obyektif politik melalui jalur konstelasi diplomasi bersama para aktor lainnya⁸. Tentunya usaha ini juga didampingi dengan partisipasi negara dalam komunitas keamanan dengan rezim yang telah terinstitusionalisasi dalam mengurangi dilema keamanan. Namun dalam proses yang berjalan, ketika melakukan interaksi di level multilateral dalam suatu rezim keamanan yang telah

¹ Leland M Goodrich, "The Maintenance of International Peace and Security," *International Organization* 19, no. 3 (1965): 429–43, <https://doi.org/DOI: 10.1017/S0020818300012388>.

² Russell H Fifield, "Korea: A Study of U. S. Policy in the United Nations. By Leland M. Goodrich. (New York: Council on Foreign Relations, Inc.1956. Pp. Xi, 235. \$3.25.)," *American Political Science Review* 51, no. 2 (1957): 558–59, <https://doi.org/DOI: 10.1017/S000305540027679X>.

³ R Kurtz, *Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict* (San Diego: Academic Press, 1999).

⁴ R Mansbach, *The Global Puzzle, Issues and Actors in World Politics* (Boston: Houghton Mifflin, 2000).

⁵ Henry A Kissinger, "Domestic Structure and Foreign Policy," *Daedalus* 95, no. 2 (August 1, 1966): 503–29, <http://www.jstor.org/stable/20026982>.

⁶ M Doyle, *Ways of War and Peace, Realism, Liberalism, and Socialism* (New York: Norton & Company, 1997).

⁷ Eduard Jordaan, "The Concept of a Middle Power in International Relations: Distinguishing between Emerging and Traditional Middle Powers," *Politikon* 30, no. 1 (May 1, 2003): 165–81, <https://doi.org/10.1080/0258934032000147282>.

⁸ Douglas Hurd, "Foreign Policy and International Security," *The RUSI Journal* 137, no. 6 (December 1, 1992): 1–4, <https://doi.org/10.1080/03071849208445650>.

⁹ Jerry Indrawan, *Pengantar Studi Keamanan* (Malang: Intrac Publishing, 2019).

terinstitusionalisasi, negara perlu melakukan rasionalisasi dan penyesuaian posisi untuk tetap mencapai kepentingan¹⁰¹¹.

PBB dalam hal ini hadir untuk mengatasi akumulasi situasi ketidakamanan yang dialami oleh aktor negara akibat proliferasi kekuatan, intensi untuk menanggapi kepentingan negara lain, dan siklus konflik¹², yang di mana dalam hal ini diselesaikan melalui PBB sebagai alat mediasi dan bina damai. Dewan Keamanan PBB (DK PBB) sebagai organ utama dengan keputusan yang mengikat secara hukum hadir untuk melakukan fasilitasi, implementasi norma, dan intervensi¹³ selama dan pasca konflik termasuk upaya pemulihan, restorasi tatanan, dan program bantuan sektoral¹⁴.

Namun, tentunya peran intervensi DK PBB sebagai entitas terkuat dalam sistem internasional untuk menegakkan keamanan dan perdamaian tidak akan lepas dari perkembangan isu geopolitik. Hal ini dapat dilihat ketika Tiongkok dan AS berseteru masalah Laut Cina Selatan (LCS) terkait versi *rules-based order* mereka secara bilateral yang mempengaruhi arus pembahasan substansi di PBB¹⁵. Kedua aktor ini bertahan karena ini merupakan *coping mechanism* bagi mereka sendiri untuk bertahan di tengah memanasnya situasi politik¹⁶. Kehadiran kekuatan revisionis di DK PBB juga terus mempengaruhi dinamika kerja DK PBB pada isu penting yang sarat akan kepentingan geopolitik dan posisi anggota tetap P5 yang terbelah. Sehingga, dari situasi ini kita belajar diperlukan peran negara *middle power* untuk menjadi pembangun jembatan di DK PBB, seperti yang di bahas penelitian ini.

Indonesia, negara *middle power* yang menjadi fokus penelitian ini telah empat kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB dan telah melakukan restrukturisasi kebijakan luar negerinya sesuai dengan konsepsi peran (*role conception*) yang dibangun. Dalam hal ini, konsepsi peran *middle power* yang digunakan mengacu pada penelitian oleh Hidayatullah (2017) yang di bahas pada Alvian (2018) yang membagi dalam tiga peran yaitu *enforcer* (penegak), *assembler* (pengumpul), dan *advocator* (pejuang advokasi negara berkembang)¹⁷¹⁸. Yang di mana klasifikasi ini

¹⁰ H Miall, *Emergent Conflict and Peaceful Change* (New York: Palgrave Macmillan, 2017).

¹¹ M Aji and Jerry Indrawan, "UNDERSTANDING PEACE STUDIES AS PART OF INTERNATIONAL RELATIONS," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 9 (December 13, 2019): 69, <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i3.645>.

¹² John H Herz, "Idealist Internationalism and the Security Dilemma," *World Politics* 2, no. 2 (1950): 157–80, <https://doi.org/DOI: 10.2307/2009187>.

¹³ Sujit Lahiry, "Conflict, Peace and Security: An International Relations Perspective with Special Reference to India," *Millennial Asia* 10, no. 1 (April 1, 2019): 76–90, <https://doi.org/10.1177/0976399619825691>.

¹⁴ Eleanor Gordon, "Security Sector Reform, Statebuilding and Local Ownership: Securing the State or Its People?," *Journal of Intervention and Statebuilding* 8, no. 2–3 (July 3, 2014): 126–48, <https://doi.org/10.1080/17502977.2014.930219>.

¹⁵ Dewi Fortuna Anwar, "Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific," *International Affairs* 96, no. 1 (January 1, 2020): 111–29, <https://doi.org/10.1093/ia/iiz223>.

¹⁶ Ningthoujam Koiremba Singh and William Nunes, "Nontraditional Security: Redefining State-Centric Outlook," *Jadavpur Journal of International Relations* 20, no. 1 (June 1, 2016): 102–24, <https://doi.org/10.1177/0973598416658805>.

¹⁷ Rizky Alif Alvian, Ganesh Cintika Putri, and Irfan Ardhani, "Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhoyono Dan Joko Widodo," *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 2 (2018): 151–68, <https://doi.org/10.18196/hi.62112>.

¹⁸ Nur Luthfi Hidayatullah, "Classifying Middle Powers Based on Their Regional and Multilateral Roles: Differentiating Middle Power Enforcers, Assemblers and Advocators BT - Proceedings of the Unhas

dalam konteks DK PBB menunjukkan bahwa para negara dari kalangan *middle power* yang menduduki posisi anggota tidak tetap DK PBB perlu memahami posisi sistemik dan kemampuan material dalam membina hubungan mereka di fora multilateral¹⁹. Hal ini penting untuk dilakukan anggota tidak tetap (E-10) *middle power* di DK PBB karena situasi kekuatan menengah saat ini berbeda dengan masa lampau satu dekade kebelakang²⁰ karena saat ini tatanan internasional terus berevolusi dari situasi unipolar ke tatanan yang lebih multipolar²¹.

Lebih lanjut, peran negara E-10 dalam menyeimbangkan P5 penting karena kekuatan informal yang dipancarkan *middle power* dalam mempengaruhi perkembangan pembahasan substansi maupun mengatasi masalah prosedural di DK PBB yang membatasi para negara E-10²². Kemudian, oleh karena negara *middle power* selalu menaruh perhatian khusus pada isu regional²³, maka dalam DK PB dan merupakan faktor yang menjadi tendensi perubahan polugri negara E-10 dalam mengarungi tatanan multilateral yang dikuasai oleh negara hegemon di tengah situasi marjinalisasi negara *middle power* pada isu *high politics* di DK PBB²⁴. Dalam menghadapi hal ini, tentu negara harus melakukan restrukturisasi kebijakan luar negeri dalam rangka untuk beradaptasi dan fokus pada cakupan lingkaran konsentris politik luar negerinya. Hal ini dikaji sebagai upaya untuk melakukan rekonstruksi realita keamanan internasional berdasarkan peran negara *middle power* sebagai anggota E-10 di DK PBB. Tekanan pada level domestik kemudian mempengaruhi posisi negara, utamanya dalam penelitian ini Indonesia sebagai aktor yang berpartisipasi di DK PBB terhadap isu konflik global yang di pengaruhi struktur kebijakan luar negerinya oleh politik diomestik²⁶ dan nuansa yang muncul dari narasi bebas aktif sebagai pedoman dasar Indonesia.

Dengan penelitian ini menekankan pada restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia di DK PBB, maka beberapa hal yang tentunya dapat digunakan dalam memahami process tracing dari perubahan polugri tersebut haruslah mengkonstruksikan tiga faktor utama: norma, identitas, dan nilai yang dianut yang

International Conference on Social and Political Science (UICoSP 2017)" (Atlantis Press, 2017), 113–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/uicosp-17.2017.32>.

¹⁹ L Roberts, C; Habir, A; Sebastian, ed., *Indonesia's Ascent: Power, Leadership, and the Regional Order* (London: Palgrave Macmillan, 2015).

²⁰ Allan Patience, "Imagining Middle Powers," *Australian Journal of International Affairs* 68, no. 2 (March 15, 2014): 210–24, <https://doi.org/10.1080/10357718.2013.840557>.

²¹ Eduard Jordaan, "The Emerging Middle Power Concept: Time to Say Goodbye?," *South African Journal of International Affairs* 24, no. 3 (July 3, 2017): 395–412, <https://doi.org/10.1080/10220461.2017.1394218>.

²² Martin Binder and Jonathan Golub, "Civil Conflict and Agenda-Setting Speed in the United Nations Security Council," *International Studies Quarterly* 64, no. 2 (June 1, 2020): 419–30, <https://doi.org/10.1093/isq/sqaa017>.

²³ Susan Hannah Allen and Amy T. Yuen, "The Politics of Peacekeeping: UN Security Council Oversight Across Peacekeeping Missions," *International Studies Quarterly* 58, no. 1 (2014): 621–32, <https://doi.org/10.1111/isqu.12086>.

²⁴ G Det. Glazebrook, "The Middle Powers in the United Nations System," *International Organization* 1, no. 2 (1947): 307–18, <https://doi.org/DOI: 10.1017/S0020818300006081>.

²⁵ Allen and Yuen, "The Politics of Peacekeeping: UN Security Council Oversight Across Peacekeeping Missions."

²⁶ Asep Setiawan, "PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP ISU NUKLIR IRAN DI DEWAN KEAMANAN PBB TAHUN 2007-2008," *Global Political Studies Journal* 3 (December 26, 2019), <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v3i2.2622>.

terus menjadi variabel yang tidak terpisahkan dalam melihat perubahan dan penentuan posisi Indonesia untuk isu strategis yang terus dibawa yaitu krisis Rohingnya dan situasi politik di kawasan dan isu keamanan dan non-proliferasi global termasuk Israel-Palestina. Kemudian penelitian ini akan melakukan analisis konvergensi berdasarkan empat negara *middle power* dari kawasan Asia Timur dan ASEAN yang memiliki posisi dan karakter diplomasi mirip dengan Indonesia. Penelitian ini akan melihat proses restrukturisasi yang dilakukan secara selintas untuk kemudian memperoleh tiga elemen analisis konvergensi yang akan dikonstruksikan dalam bagian pembahasan penelitian ini. Adapun kajian dari Amitav Acharya secara spesifik melakukan generalisasi terhadap posisi Indonesia di DK PBB dari kacamata posisi konvergensi negara-negara ASEAN yang berfokus pada konstruksi tatanan ide dan tidak hanya pada materialisasi perilaku polugrinya itu sendiri. Latar belakang inilah yang menjadi fokus pengkajian *process tracing* eksploratif yang dilakukan pada penelitian ini.

Teori Restrukturisasi Kebijakan Luar Negeri Model KJ Holsti

Analisis kebijakan luar negeri yang berfokus pada pengamatan dan eksplorasi yang menekankan pada elemen perubahan perilaku aktor dan intensi aktor lainnya menjadi elemen dasar dari pemikiran restrukturisasi kebijakan luar negeri²⁷. Penelitian ini menggunakan kerangka teori restrukturisasi kebijakan luar negeri yang diusung oleh KJ Holsti sebagai kerangka analisis pembahasan pada penelitian ini. Model dari KJ Holsti ini adalah penyempurnaan dari dua model sebelumnya yang menjelaskan terkait perubahan dalam aksi kebijakan luar negeri aktor negara dalam sistem internasional. Model pertama adalah terkait struktur relasi dan aksi dalam analisis kebijakan luar negeri sedangkan model kedua adalah model pemikiran Goldmann dalam proses analisis perubahan kebijakan luar negeri. Kedua model ini merupakan dua model yang menjadi basis pada model baru KJ Holsti terkait restrukturisasi kebijakan luar negeri yang menggunakan tiga variabel yaitu variabel independen, dependen, dan intervensi yang di bahas pada bagian ini. Ditegaskan kembali bahwa model KJ Holsti adalah model yang digunakan dalam penelitian ini dengan tetap membahas juga dua model pendahulunya sebagai perbandingan.

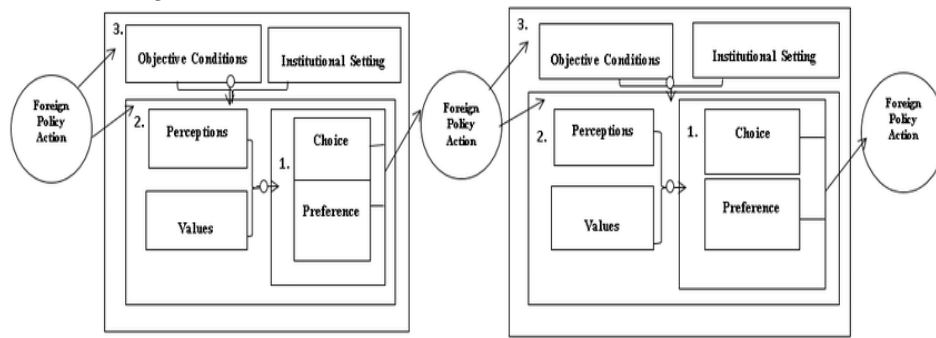
Model pertama adalah struktur relasi dan aksi dalam analisis kebijakan luar negeri yang menekankan pada obyektif, kondisi lingkungan strategis di sekitar suatu negara, nilai kepentingan yang berpengaruh pada opsi kebijakan, serta aksinya yang diimplementasikan oleh negara²⁸. Dalam realisasi kepentingan nasional, perlu diketahui bahwa struktur dan sistem yang dibangun dalam polugri negara memiliki elemen penting yaitu agen dan struktur yang penting dalam menjelaskan proses penyusunan kebijakan luar negeri yang diputuskan oleh aktor domestik²⁹. Dalam model pertama ini, aksi kebijakan luar negeri di bangun atas kondisi dari objektif yang ingin dicapai, pengaturan institusional yang ada. Kemudian, nilai yang dianut dalam kebijakan luar negeri beserta dengan preferensi kebijakan yang terbentuk

²⁷ G Modelski, *A Theory of Foreign Policy* (New York: Praeger, 1962).

²⁸ Ridvan Kalayci, "No Title," *Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences* 21, no. 2 (2019): 533–53.

²⁹ Alexander E Wendt, "The Agent-Structure Problem in International Relations Theory," *International Organization* 41, no. 3 (1987): 335–70, <https://doi.org/DOI: 10.1017/S002081830002751X>.

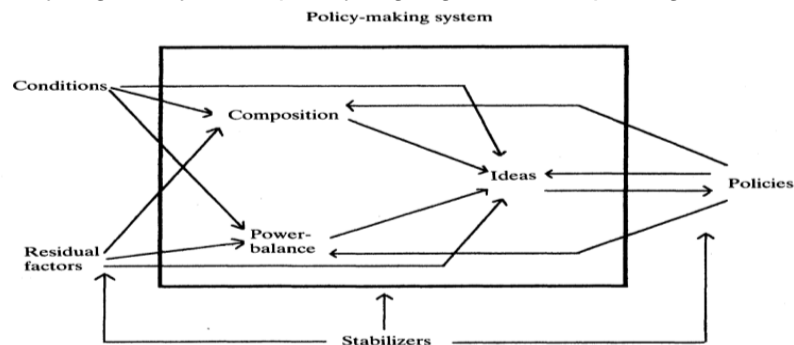
menjadi bagian dari struktur relasi kebijakan luar negeri antara kelompok yang di visualisasikan di gambar di bawah ini.



Sumber: Kalayci, 2019

Gambar 1. Model Struktur Relasi – Aksi Dalam Analisis Kebijakan Luar Negeri

Dari model pertama di atas, kemudian kita masuk ke dalam model kedua yaitu terkait pemikiran Goldmann yang tertuang dalam proses analisis perubahan kebijakan luar negeri. Model pertama dan kedua masih memiliki keterkaitan di mana mereka menggunakan pendekatan pada perilaku (*behaviouralistic*) dan di model ini dikritik karena masih sangat erat dengan faktor keseimbangan kekuatan (*balance of power*) dan elemen residual lainnya³⁰. Model Goldmann ini menekankan bahwa ide, komposisi, dan keseimbangan kekuatan menjadi elemen yang mengubah kebijakan luar negeri negara dengan masing – masing elemen memiliki keterkaitan dan di pengaruhi oleh yang lainnya³¹, seperti yang digambarkan pada gambar 2.



Sumber: Carlsnaes, 1993

Gambar 2. Model Goldmann Dalam Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Model ini Goldmann ini menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri tentunya tidak akan terlepas dari pola baik adaptif maupun fleksibel, oleh karena itu dijelaskan oleh Goldmann bahwa kebijakan luar negeri akan selalu adaptif terhadap lingkungan mereka berada, dan *external shock* juga menjadi pemicu restrukturisasi kebijakan luar negeri³². Karena adanya dua unsur ini, perubahan kebijakan luar negeri dilakukan sebagai modalitas untuk menjembatani dampak eksternal ke lingkungan domestik³³. Penelitian sebelumnya membahas bahwa modalitas ini umumnya

³⁰ WALTER CARLSNAES, "On Analysing the Dynamics of Foreign Policy Change:: A Critique and Reconceptualization," *Cooperation and Conflict* 28, no. 1 (March 1, 1993): 5–30, <https://doi.org/10.1177/0010836793028001001>.

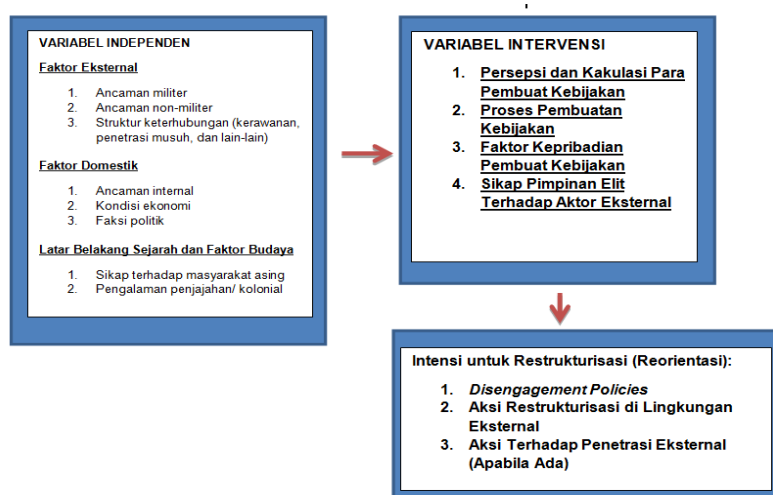
³¹ CARLSNAES.

³² Kjell Goldmann, "Change and Stability in Foreign Policy: Detente as a Problem of Stabilization," *World Politics* 34, no. 2 (1982): 230–66, <https://doi.org/DOI: 10.2307/2010264>.

³³ C Hill, *The Changing Politics of Foreign Policy* (New York: Palgrave Macmillan, 2003).

dikaitkan dengan pergeseran kekuatan (*power shift*) dan perubahan kontur dalam diskursus hubungan internasional³⁴³⁵.

Kemudian masuk ke model ketiga yang merupakan improvisasi dari dua model sebelumnya, dan merupakan model yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu model restrukturisasi kebijakan luar negeri yang diperdalam oleh KJ Holsti (2016). Holsti menilai bahwa restrukturisasi kebijakan luar negeri (RKLN) adalah proses reorientasi yang menekankan pada perubahan baik yang simultan maupun secara keseluruhan³⁶. Hal ini merupakan pengembangan bahwa perilaku negara terhadap lanskap politik internasional, keputusan, dan aspirasi yang ada merupakan gambaran perilaku aktor negara³⁷ yang di bangun atas pertimbangan komponen domestik dan internasional³⁸.



Sumber: Holsti, 2016 dan diolah oleh penulis

Gambar 3. Model Analisis Tiga Variabel RKLN Holsti

Holsti menggambarkan model analisis RKLN tersebut dengan tiga variabel utama: (1) variabel independen yang memiliki tiga faktor yaitu eksternal, domestik, dan sejarah serta budaya; (2) variabel intervensi yang terdiri dari empat elemen yaitu persepsi pembuat kebijakan, proses pembuatan kebijakan, faktor kepribadian aktor, dan sikap elit terhadap aktor eksternal; dan (3) variabel dependen yang menjelaskan intensi aktor untuk melakukan restrukturisasi *vis-a-vis* reorientasi kebijakan luar negerinya melalui *disengagement policy*, aksi restrukturisasi di lingkungan eksternal, dan respons terhadap penetrasi eksternal³⁹. Model ini sendiri di dampingi oleh tiga model unit analisis yang digunakan karena pendekatan yang dilakukan terhadap teori ini sangatlah bersifat multilevel. Unit analisis pertama adalah perubahan

³⁴ Mohamad Rosyidin, "Regionalism under Challenge: Ideas and Joko Widodo's Foreign Policy towards ASEAN, 2014-2019," *Journal of ASEAN Studies* 8, no. 2 (2020): 147–72, <https://doi.org/10.21512/JAS.V8I2.6596>.

³⁵ S MacDonald and J Lemco, *Asia's Rise in the 21st Century* (Santa Barbara: Praeger, 2011).

³⁶ K.J. Holsti, *A Pioneer in International Relations Theory, Foreign Policy Analysis, History of International Order and Security Studies* (Vancouver: Springer, 2016).

³⁷ K.J. Holsti, *International Politics, A Framework for Analysis* (London: Allen and Unwin, 1983).

³⁸ Kissinger, "Domestic Structure and Foreign Policy."

³⁹ Holsti, *A Pioneer in International Relations Theory, Foreign Policy Analysis, History of International Order and Security Studies*.

tipologis yang melibatkan program dan intensi suatu kebijakan luar negeri⁴⁰. Unit analisis kedua adalah perubahan model batasan struktural yang fokus pada perubahan verbal dan non verbal dalam definisi suatu kebijakan luar negeri negara⁴¹ dan pada program yang diubah secara sporadis/ evolusioner⁴². Dan unit analisis ketiga adalah model *cyclical* yang menekankan pada hasil yang tidak memiliki perubahan spesifik dalam suatu kebijakan luar negeri dalam tingkatan yang lebih rendah⁴³ namun akan mengubah program kebijakan luar negeri tersebut⁴⁴.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif bersumber dari studi kepustakaan dan analisis menggunakan data wawancara bersama praktisi terkait dari Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk mencari temuan baru yang dilandasi oleh penelitian terdahulu yang kemudian dioperasionalkan dalam kerangka teori⁴⁵. Data yang digunakan dalam analisis penelitian ini sendiri kemudian dipakai untuk mengembangkan argumen dan temuan setelah direkonstruksi berdasarkan kerangka berpikir untuk menjawab permasalahan penelitian⁴⁶.

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif ketimbang interpretatif melalui *process tracing* dalam analisis kausalitas dan observasi proses hal yang menjadi muatan penelitian ini melalui metode kualitatif⁴⁷. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Indonesia sebagai negara *middle power* melakukan RKLN sebagai pembangun jembatan (*bridge-builder*) di DK PBB selama masa keanggotaannya 2019 – 2020; dan (2) Apa yang menjadi faktor, elemen, dan eksplorasi yang dilakukan negara *middle power* dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional di tengah urgensi reformasi DK PBB dan perubahan dinamika global dalam satu dekade kebelakang?

Analisis Konvergensi RKLN *Middle Power* Mantan Anggota E-10 DK PBB

Area konvergensi dalam hal ini dijadikan sebagai acuan dalam memperbandingkan elemen dan fitur kebijakan luar negeri yang telah terstrukturisasi. Dalam hal ini peran Indonesia bisa dibandingkan dengan dua

⁴⁰ K.J. Holsti, *Why Nations Realign: Foreign Policy Restructuring in the Postwar World* (London: Allen and Unwin, 1982).

⁴¹ Goldmann, "Change and Stability in Foreign Policy: Detente as a Problem of Stabilization."

⁴² David Skidmore, "Explaining State Responses to International Change: The Structural Sources of Foreign Policy Rigidity and Change," in *Foreign Policy Restructuring: How Governments Respond to Global Change*, ed. J Rosati, J Hagan, and M Sampso (Colombia: University of South Carolina Press, 1994), 43–61.

⁴³ CARLSNAES, "On Analysing the Dynamics of Foreign Policy Change: A Critique and Reconceptualization."

⁴⁴ Jerel A Rosati, "Cycles in Foreign Policy Restructuring: The Politics of Continuity and Change in US Foreign Policy," in *Foreign Policy Restructuring: How Governments Respond to Global Change*, ed. J Rosati, J Hagan, and M Sampso (Colombia: University of South Carolina Press, 1994), 221–61.

⁴⁵ Alan Bryman, "Integrating Quantitative and Qualitative Research: How Is It Done?," *Qualitative Research* 6, no. 1 (February 1, 2006): 97–113, <https://doi.org/10.1177/1468794106058877>.

⁴⁶ J.W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2012).

⁴⁷ David Collier, "Understanding Process Tracing," *PS: Political Science & Politics* 44, no. 4 (2011): 823–30, <https://doi.org/DOI: 10.1017/S1049096511001429>.

kelompok negara lain yaitu Asia Timur (Jepang dan Korea Selatan) serta ASEAN (Malaysia dan Vietnam) berdasarkan studi sebelumnya yang telah mengklasifikasi negara ini sebagai *middle power* di kawasan masing-masing⁴⁸. Penelitian ini menggunakan dua elemen dasar untuk menganalisis peran *middle power* yang digunakan dalam penelitian ini untuk dikaitkan dengan peran mereka sebagai mantan/ anggota tidak tetap DK PBB sebagai seorang *middle power* melalui dua tinjauan yaitu pada konsepsi peran serta motif dan terkait proses historis pembentukan identitas negara *middle power* tersebut dari identitas baru menjadi ke suatu status yang lebih matang dan dewasa bagi jati diri negara tersebut⁵⁰.

Dimulai dari kelompok Asia Timur yaitu Jepang dan Korea Selatan, beberapa poin yang beririsan adalah terkait RKLN mereka: (1) posisi di DK PBB terus dipengaruhi oleh masalah geopolitik (isu nuklir Korea Utara dan Tiongkok)⁵¹; (2) ruang otonomi kebijakan luar negeri Jepang dan Korea cenderung kecil karena bergantung pada aktor asing dan terikat maupun perjanjian pertahanan bilateral yang juga di pengaruhi oleh dinamika politik domestik (isu partisan); (3) melakukan regionalisasi isu prioritas dan mendorong multilateralisme untuk memberikan tekanan global kepada Korea Utara dan aktor lain dalam atasi konflik ketimbang secara unilateral langsung melakukan agresi politik; dan (4) bekerja sama secara institusional dengan ASEAN dan terus membangun jejaring politik dengan inisiatif minilateral lain untuk induksi norma⁵³.

Kelompok ASEAN yaitu Malaysia dan Vietnam, dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi elemen konvergensi *middle power* sebagai E-10 DK PBB: (1) Malaysia dan Vietnam aktif dalam mempromosikan ASEAN sebagai referensi utama posisi nasional⁵⁴; (2) aktif dalam mencari *likeminded countries* untuk penetapan norma yang dapat meningkatkan materialisasi kepentingan negara menengah⁵⁵ dengan lebih pragmatis sebagai *advocator* di DK PBB; (3) sebagai negara bertumbuh, masih aktif secara melihat keluar dan keseimbangan relasi dengan

⁴⁸ Gabriele Abbondanza, "Whither the Indo-Pacific? Middle Power Strategies from Australia, South Korea and Indonesia," *International Affairs* 98, no. 2 (March 7, 2022): 403–21, <https://doi.org/10.1093/ia/iab231>.

⁴⁹ Hidayatullah, "Classifying Middle Powers Based on Their Regional and Multilateral Roles: Differentiating Middle Power Enforcers, Assemblers and Advocators BT - Proceedings of the Unhas International Conference on Social and Political Science (UICoSP 2017)."

⁵⁰ Moch Faisal Karim, "Middle Power, Status-Seeking and Role Conceptions: The Cases of Indonesia and South Korea," *Australian Journal of International Affairs* 72, no. 4 (July 4, 2018): 343–63, <https://doi.org/10.1080/10357718.2018.1443428>.

⁵¹ C Anindya, "The Evolving Security Policy of Japan and the Adherence to Antimilitarism Culture," *Global: Jurnal Politik Internasional* 15, no. 2 (2016).

⁵² Duyeon Kim, "How to Keep South Korea from Going Nuclear," *Bulletin of the Atomic Scientists* 76, no. 2 (March 3, 2020): 68–75, <https://doi.org/10.1080/00963402.2020.1728966>.

⁵³ Andrew F Cooper, "Testing Middle Power's Collective Action in a World of Diffuse Power," *International Journal* 71, no. 4 (December 1, 2016): 529–44, <https://doi.org/10.1177/0020702016686384>; Abbondanza, "Whither the Indo-Pacific? Middle Power Strategies from Australia, South Korea and Indonesia"; Hino Samuel Jose and Sigit Aris Prasetyo, "A Strategic View of Minilateralism: Indonesia, Quad, ASEAN, South Korea, Japan, and Impediment to ASEAN Centrality," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 4, no. 2 (2021): 1–21, <https://doi.org/10.52617/jikk.v5i2.268>.

⁵⁴ Anh Tuan Ha and Hai Binh Le, "Decoding Vietnam's Multilateral Diplomacy," *East Asia* 39, no. 2 (2022): 161–79, <https://doi.org/10.1007/s12140-021-09375-w>.

⁵⁵ M Hamid, "Malaysia's Membership at the UN Security Council 2015 - 2016: Successes and Setbacks," *Malaysian Journal of International Relations* 8, no. 1 (2020): 87–103.

negara adi daya dan mempertahankan fleksibilitas kerja sama; (4) melakukan formulasi yang lebih konstruktif ketimbang konsultatif sambil meningkatkan fungsionalitas diplomasinya.

Dari dua kelompok tersebut, diperoleh tiga elemen penting yang ditemukan sebagai hasil dari pertemuan karakter *middle power* dari ke empat negara tersebut dari kelompok Asia Timur dan ASEAN: (1) Ruang otonomi kebijakan luar negeri dan ketergantungan terhadap *major power*; (2) Dinamika ancaman dan persepsi negara terhadap kerja sama isu kawasan; dan (3) Faktor kepemimpinan dan politik domestik. Tiga temuan ini sendiri menurut penulis merupakan pre teori prematur yang dapat dipertimbangkan. Hal ini karena untuk otonomi misalkan, penting bagi negara untuk terus mencari kebebasan negara dalam diversifikasi polugrinya, kemampuan untuk menyatakan posisi tanpa harus *bandwagoning* dengan negara besar, kemampuan *dual engagement* dalam pelaksanaan kerja sama; tingkat ketergantungan dengan aktor asing, dan otonomi untuk mengubah polugri yang masuk juga dalam lingkup karakter diplomasi multilateral di DK PBB. Kemudian untuk dinamika ancaman isu kawasan, dapat dipelajari bahwa isu regional penting dan terus relevan menjadi konsiderans *middle power*, isu kawasan penting dalam mobilisasi sumber daya diplomasi, menjadi area untuk materialisasi *middle powermanship* yang dibentuk berdasarkan konsep peran yang dipilih ketika berpartisipasi dalam pembahasan multilateral di DK PBB. Faktor kepemimpinan sendiri menurut penulis penting karena akan menentukan bagaimana suatu negara dapat mengelola dan berpikir untuk melawan batasan yang ada, menjadi elemen utama dalam menanggapi tuntutan domestik terhadap polugri; dan interpretasi pemimpin akan konsepsi peran *middle power* yang dianut akan mempengaruhi mereka dalam bagaimana melihat multilateralisme.

Restrukturisasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di DK PBB Pada Era Presiden Joko Widodo

Diplomasi Indonesia pada era Presiden Joko Widodo sangat membumi dan mengedepankan narasi serta pembangunan politik luar negeri yang merakyat dan *down to earth*. Hal ini memang terjadi karena pengaruh daripada gaya kepemimpinan dan pembawaan politik Presiden Joko Widodo yang sangat pro akan rakyat. Menciptakan diplomasi multilateral yang membumi adalah salah satu cita-cita yang diangankan oleh Presiden Jokowi, namun pada pelaksanaannya memang ini menimbulkan tantangan tersendiri sehingga Indonesia harus melakukan sesuatu proses restrukturisasi kebijakan luar negeri demi memposisikan Indonesia agar lebih koheren dan relevan dalam membumikan diplomasi multilateral.

Diplomasi multilateral sulit untuk menghasilkan suatu hasil konkret yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat karena hanya bersifat untuk membangun aturan dan norma (*rule making* dan *norm setting*) serta membahas suatu konteks permasalahan pada lingkup substansi yang lebih luas. Sehingga, diplomasi multilateral pro-rakyat Indonesia, termasuk apa yang dilakukan di DK PBB, dilakukan melebihi batas kepentingan geopolitik yang menjadi bagian dari konsepsi peran *middle power* Indonesia⁵⁶. Prinsip bebas aktif Indonesia dalam hal ini menjadi unsur pembantu yang signifikan mendorong dukungan multilateral ketika Indonesia

⁵⁶ A Haryanto, "Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran," *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* 4, no. 2 (2014): 17–27.

mengajukan suatu norma, karena Indonesia di kenal sebagai negara bebas aktif. Dari hal ini, Indonesia di bawah Menlu Retno yang mengarahkan agar Indonesia menjadi pembangun jembatan, *norm entrepreneur* sebagai seorang *middle power* yang bertumbuh dari normatif menjadi yang bersifat fungsional.

Proses Bergulirnya Pencalonan Indonesia untuk DK PBB (2016 – 2018)

Pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB sudah dimulai setidaknya kurang lebih tiga tahun sebelum keanggotaan dimulai sejak tahun 2016, di mana Indonesia melakukan berbagai kampanye yang dilaksanakan untuk menggalang dukungan. Salah satu modal Indonesia adalah kontribusinya pada misi perdamaian internasional PBB. Pengiriman pasukan perdamaian merupakan salah satu jati diri kontribusi Indonesia dalam mewujudkan cita – cita politik luar negeri Indonesia yang diamanatkan pada UUD 1945. Kampanye akan diikuti oleh proses resepsi diplomatik dan pendekatan lobi secara bilateral untuk sampaikan muatan kampanye Indonesia.

Menlu Retno juga secara aktif menggabungkan butir wicara terkait permohonan dukungan dengan mitra bilateral pada pertemuan bilateral baik yang dilaksanakan di Indonesia maupun di luar negeri. Pada tahun 2017 sendiri, kunjungan Menlu Retno untuk hadir SMU PBB di New York juga diselingi dengan agenda 70 pertemuan bilateral yang salah satu butir wicaranya adalah memohon dukungan secara langsung. Hal ini penting karena umumnya apabila dukungan disampaikan dari pejabat tinggi setingkat Menteri, maka akan lebih “serius” dan lebih konkret untuk diteruskan ke level pejabat di bawahnya untuk dilaksanakan (*top down*).

Proses Perencanaan Kebijakan Prioritas Indonesia di DK PBB

Dalam proses ini, penulis berkaca pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri RI tahun 2014 – 2019 yang mendorong beberapa isu prioritas dasar Indonesia di DK PBB. Berbagai prioritas seperti reformasi DK PBB, penguatan hubungan kelembagaan DK PBB, keterwakilan negara berkembang, dan isu perlindungan menjadi prioritas erat⁵⁷. Indonesia dalam hal ini juga mendorong agar DK PBB lebih transparan, akuntabel, lebih representatif, dan demokratis di tengah tajamnya perbedaan posisi anggota DK PBB yang memerlukan pendekatan *intermediate* pemerintah Indonesia. Selain itu, Indonesia juga terus mendorong identitasnya sebagai pembangun jembatan di tengah kuatnya tarik ulur yang terdominasi oleh *hard power*⁵⁸. Indonesia menunjukkan koherensi posisinya sebagai *middle power* dan kontributor terhadap operasi perdamaian PBB dengan mengusung tema “*A True Partner for World Peace*”. Dari tema ini, kemudian perencanaan mengusung DK PBB agar lebih transparan, akuntabel, lebih representatif, dan demokratis di tengah tajamnya perbedaan posisi anggota DK PBB yang memerlukan pendekatan *intermediate* pemerintah Indonesia. Indonesia dalam ini menurut penulis mengusung pendekatan dan usulan prioritas tersebut dalam perencanaan posisi

⁵⁷ Kementerian Luar Negeri, “Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2014 - 2019” (Jakarta, 2014).

⁵⁸ | Johnstone, *The Power of Deliberation: International Law, Politics and Organization* (Oxford: Oxford University Press, 2011).

nasionalnya mengingat banyaknya kerancuan normatif dan penerapan norma fundamental yang hanya sebatas menjadi alat permainan politik negara besar⁵⁹.

Selain itu sebelum adanya Indonesia hadir kembali di DK PBB, pembangunan jembatan antar kepentingan sangatlah minim dilakukan oleh para negara *middle power* yang menjadi anggota E-10 DK PBB sebelum Indonesia. Hal ini membuat tarik ulur dan penyusunan norma cenderung di dominasi oleh kekuatan keras (*hard power*) dan intervensi militer sebagai bagian dari kegiatan diplomasi yang juga didukung dengan interdependensi ekonomi dengan negara besar, yang tentunya menurut penulis membuat para *middle power* E-10 yang hadir di DK PBB tidak berdaya. Faktor – faktor inilah yang menyebabkan penyusunan prioritas tersebut yang dituangkan dalam Renstra Kemlu membuat penulis yakin bahwa itu semua relevan. Namun penulis berpendapat, bahwa tidak semua prioritas tersebut dapat terwujud dalam resolusi DK PBB konkret (catatan bahwa setiap resolusi DK PBB mengikat secara hukum/ *legally binding*). Sehingga, terkait reformasi DK PBB, penulis bahkan sejak sebelum mulai menganalisis bagian ini menaruh pesimisme karena eksistensi veto masih ada dan tentunya harus ada kompromi yang diberikan oleh para negara P5, yang dalam hal ini menjadi perhatian khusus yang membuat Indonesia menaruh *bridge building* sebagai salah satu upaya kunci.

Perjalanan ini kemudian dilanjutkan dalam pembentukan 4+1 prioritas keanggotaan Indonesia di DK PBB, jadi apabila tadi bersifat visioner, maka ini akan lebih bersifat spesifik dan telah mengalami penyesuaian agar koheren dengan konteks operasional tugas sehari – hari Indonesia sebagai E-10 DK PBB. Pertama, untuk memperkuat ekosistem dan geopolitik untuk menciptakan dunia yang stabil dan damai melalui penyelesaian yang damai dan konstruktif melalui operasi perdamaian dan promosi penyelesaian sengketa melalui mekanisme kemitraan dan regionalisme. Dari prioritas pertama ini, ada beberapa kata kunci yang bisa diambil yaitu penyelesaian damai, stabilitas, kemitraan, dan regionalisme. Keempat kata kunci tersebut merupakan bentuk rasionalisasi yang menurut penulis, berangkat dari asumsi perilaku *middle power* yang telah di bahas sebelumnya, dan Indonesia sebagai pembangun jembatan melaksanakan modalitasnya juga untuk mempromosikan semangat yang dilakukan di ASEAN (regionalisme sebagai penyelesaian konflik) untuk dilakukan juga dan memposisikan Indonesia sebagai percontohan melalui kemitraan regionalisme dalam resolusi konflik ini. Indonesia juga mempelopori pembentukan mekanisme baru yang menjadi metode kerja inovatif untuk pembahasan isu agenda DK PBB yang lebih fleksibel. Salah satunya adalah *Sofa Talk* yang menjadi usulan Indonesia dan menjadi praktek baru di DK PBB untuk membantu penyelesaian masalah negosiasi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia fokus pada pendekatan *soft power* yang bertumpu pada kemampuan interpersonal.

Indonesia di DK PBB dan RKLN dalam Isu Tradisional 2019 – 2020

Ada beberapa isu yang menjadi perhatian tentunya, yaitu isu Palestina, proliferasi nuklir, dan isu keamanan lainnya yang menjadi pembahasan di DK PBB. Adapun pada bagian ini penulis akan lebih fokus pada membahas secara keseluruhan dari aktivitas selama tahun 2019 – 2020 di berbagai isu yang di mana Indonesia terlibat dari kacamata restrukturisasi kebijakan luar negeri. Pada tahun

⁵⁹ M Rosenfeld and A Sajo, *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law* (Oxford: Oxford University Press, 2012).

2019 DK PBB mengadopsi 52 resolusi, 15 presidential statement, melakukan 258 dalam berbagai format, dan 49 butir agenda dibahas dengan total 12 Presidensi, 2 resolusi besar untuk isu terorisme, 2 misi lapangan baru, 2 resolusi dasar baru terkait perlindungan warga sipil, dan Indonesia menjadi Presiden DK PBB pada bulan Mei 2019. Sementara itu pada tahun 2020, DK PBB sendiri mengadakan 269 pertemuan virtual, 81 pertemuan publik dan privat, 57 resolusi, dan 13 presidential statement DK PBB; selain itu juga dicapai misi lapangan baru di UNITAMS, UNAMID, UNIOGBIS, dan juga adopsi resolusi terkait peninjauan kembali struktur Peacebuilding Commission.

Pada isu Palestina langsung akan analisis RKLN, Indonesia melakukan tweaking terhadap prosedur dengan mengeluarkan keterangan pers yang disusun antara anggota tidak tetap E-10 tanpa melibatkan P5. Perubahan ini menunjukkan bahwa Indonesia terus mendorong usaha kolaboratif dan sadar akan realita yang kompleks apabila menempuh mekanisme reguler seperti biasa. Indonesia mengubah rencana dan siasat kebijakan luar negerinya menanggapi tantangan yang berat dari P5 dengan cara yang lebih konstruktif tanpa sikap yang asertif dan terus menjaga *confidence* antar negara E-10. Indonesia berusaha membangun jembatan antara negara E-10 yang awalnya tidak sependapat akan rilis pers informal tersebut, dan Indonesia berhasil juga menjaga status quo kelangsungan isu dengan cara non konvensional dalam level negara di DK PBB.

Pada isu Myanmar, Indonesia membuka kesempatan dan mengambil inisiatif pertama untuk membuka jalur kerja sama ASEAN dan DK PBB untuk isu Myanmar. Disini terdapat perubahan polugri di mana Indonesia secara proaktif mendorong kelembagaan dan tidak hanya norma dan program unilateral Kemlu. Upaya penyesuaian polugri dengan memanfaatkan ruang gerak prosedural untuk kegiatan substansial belum sepenuhnya terakomodasi dalam realita di DK PBB karena waktu Presidensi Indonesia yang hanya 1 bulan dan padatnya jadwal DK PBB untuk kegiatan tambahan yang bersifat tingkat tinggi. Indonesia berhasil membangun jembatan antara cakupan diplomasi multilateral dengan isu kawasan yang dihadapi middle power di ASEAN walaupun belum ada hasil konkret yang tercapai. Namun dalam hal ini Indonesia berhasil menetapkan institutional memory terkait hal ini di DK PBB.

Pada isu Timur Tengah dan konflik lainnya, • Indonesia belum melakukan pendirian yang aktif karena untuk isu Afrika semua keputusan masih sebatas perpanjangan mandat dan keputusan dari resolusi sebelumnya. Mendorong kerja sama pembangunan untuk ciptakan stabilitas domestik dan kestabilan kekuasaan politik di negara – negara yang masih rawan. Persiapan substansi dan perencanaan prioritas dalam mewujudkan diplomasi multilateral yang pro rakyat sangat ditonjolkan pada isu Palestina dan perdamaian di Timur Tengah dan kawasan Asia Tengah. Dalam isu Afghanistan dan Palestina, Indonesia secara aktif memberikan bantuan konkret kepada kedua negara.

Indonesia di DK PBB Pada Isu Non Tradisional

Indonesia telah dua kali menjalani masa presidensi di DK PBB pada Mei 2019 dan Agustus 2020, Indonesia telah melakukan perannya sebagai Presiden dengan terus membuat DK PBB produktif dan dapat membahas semua isu yang dimandatkan kepada DK PBB untuk dibahas dan diselesaikan. Tiga pertemuan high level *open debate* atau debat tingkat tinggi dan satu pertemuan Arria Formula

Meeting DK PBB yang membahas terorisme dan kejahatan transnasional (*Linkage of Counterterrorism and transnational organized crime*). Indonesia sendiri memiliki tiga fokus poin utama dalam penanganan masalah kejahatan transnasional dan terorisme di tengah pandemi Covid-19 untuk mencegah proliferasi konflik yang notabene diakibatkan oleh jaringan sindikat terorganisir.

Kemudian, dari dinamika pertemuan debat terbuka dan *Arria Formula Meeting*, Indonesia juga membahas kaitan antara terorisme dan kejahatan transnasional lebih lanjut. Dengan adanya dua pertemuan tingkat tinggi di DK PBB untuk membahas TOC dan hubungannya dengan terorisme, ini menurut penulis merupakan usaha yang cukup serius dikarenakan dari total 12 pertemuan terbuka, 12 pertemuan tertutup, 5 agenda sampingan, dan 12 pertemuan dengan organ di bawah naungan DK PBB dan 2 di antaranya membahas mengenai hubungan terorisme dan TOC menunjukkan diversifikasi dan usaha Indonesia untuk menjaga ketahanan para negara dari para ancaman di tengah pandemi Covid-19. Dari pertemuan DK PBB pada 6 Agustus 2020 contohnya, pembahasan mengenai pola transit dan pembatasan seperti lockdown di tengah pandemi Covid-19 akan memberikan tantangan dalam hal keamanan perbatasan – dan para negara-negara anggota DK PBB di situ juga setuju dengan implementasi lanjutan dari resolusi DK PBB No. S/RES/2482 tahun 2019 yang mengatur mengenai penguatan perbatasan laut, darat, dan udara melalui koordinasi yang dilengkapi oleh pengumpulan data yang baik untuk menciptakan praktek yang sesuai. Negara-negara seperti Belgia, Prancis, dan Inggris memiliki pandangan yang sama bahwa kejahatan siber juga harus menjadi bagian dari fokus para negara dalam menangani TOC, namun dalam hal ini tidak dapat menjadi solusi utama dan harus diingat bahwa sinergi antara berbagai aktor harus diperlukan. Indonesia juga mengajukan sebuah rancangan resolusi terkait pendekatan komprehensif untuk melawan terorisme dan ekstremisme kekerasan, namun AS melakukan veto terhadap rancangan resolusi ini pada saat voting di September 2020 yang membuat Indonesia gagal mencapai hasil konkret. Justifikasi AS adalah bahwa ranres tersebut tidak dengan baik membahas kepastian dan pengaturan terkait repatriasi teroris.

Indonesia pada isu terkait keamanan non tradisional ini pada Presidensi Agustus 2020 berhasil melaksanakan dialog tingkat tinggi terkait hubungan isu kejahatan transnasional dan terorisme pada 6 Agustus 2020, pertemuan dialog tingkat tinggi terkait isu COVID-19 dan tantangan mewujudkan perdamaian berkelanjutan pada 12 Agustus 2020 serta 1 *Arria Formula Meeting* mengenai dampak serangan siber terhadap infrastruktur vital pada 27 Agustus 2020 yang merupakan seri kedua lanjutan dari *Arria Formula Meeting* pertama pada 9 Juli 2019 terkait hubungan keterkaitan terorisme dan kejahatan transnasional. Dengan detail tersebut, maka dapat diperoleh argumen bahwa agenda keamanan kontemporer yang diusung Indonesia terkait isu terorisme dan kejahatan transnasional adalah isu yang sentris kepada manusia sebagai korban dan entitas sentral. Agenda yang dibawa Indonesia terkait hal ini sebagai Presiden DK PBB menunjukkan bahwa Indonesia ingin meningkatkan diplomasinya ke ruang siber yang jarang tersentuh.

Untuk melihat kesimpulan pada bab ini, penulis ingin membaginya dalam tiga narasi kesimpulan dari proses peninjauan kembali dan analisis restrukturisasi kebijakan RI dari masa ke masa hingga ke DK PBB. Pertama, diplomasi multilateral *middle power* sebagai pembangun jembatan (*bridge builder*) pro rakyat memanfaatkan ruang prosedural untuk mengatasi masalah substansial yang

dihadapi akibat sistem yang saat ini belum di reformasi dengan baik di DK PBB. Kedua, Indonesia merupakan negara yang mendapatkan *reception* yang cukup positif dan walaupun Indonesia dan negara seperti AS masih bertentangan pada beberapa isu, namun Indonesia berhasil memperkenalkan cara kerja baru kepada P5 untuk menyelesaikan masalah lebih informal dan santai. Ketiga, restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia berhasil membuat Indonesia berproses, namun tidak selalu berhasil memberikan hasil konkret karena batasan prosedural dan substansi yang sudah ada sebelum Indonesia masuk ke DK PBB. Namun, narasi diplomasi multilateral *middle power* yang membumi masih cukup relevan dan akan terus menjadi orientasi polugri yang mampu meningkatkan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral termasuk DK PBB.

Analisis Peran Multilateral *Middle Power* Sebagai *Bridge-builder* di DK PBB

Ada beberapa realita yang dihadapi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah dalam membelah langit untuk melancarkan RKLN di DK PBB. Realita pertama, ada empat peran yang bisa diambil oleh sebuah negara *middle power* dalam diplomasinya: (1) menjadi penengah dalam mediasi (*mediator*)⁶⁰; (2) pembangun jembatan (*bridge-builder*)⁶¹; (3) penyeimbang (*balancer*); dan sebagai pemeran advokasi (*advokator*) untuk menyuarakan pentingnya multilateralisme. Realita kedua dalam konteks Indonesia, tentu penulis percaya bahwa peran negara *middle power*, spesifiknya sebagai pembangun jembatan, merupakan salah satu opsi strategis yang memiliki banyak irisan yang sangat sesuai dengan realita polugri Indonesia. Realita ketiga, penulis akan berbicara terkait klasifikasi aksi penting dalam bersikap dan apa yang harus dilakukan sebagai dasar dari menjaga kesinambungan peran sebagai pembangun jembatan dalam forum multilateral vis-a-vis DK PBB. Realita keempat, bahwa forum multilateral memiliki keterbatasan, di mana pertemuan diplomasi multilateral memiliki legitimasi yang lebih lemah karena kritik semua orang adalah, forum multilateral tidak bisa menghasilkan suatu hal yang konkret. Realita kelima, negara *middle power* merupakan negara yang tidak bisa digeser dalam diplomasi multilateral karena mempunyai kapasitas normatif dan *behavioural* yang membuat mereka penting sebagai aktor lapisan kedua. Realita keenam adalah *middle power* harus mampu mengatasi pengaruh di mana politik internasional akan sangat erat dengan politik negara besar *great power politics* karena ketika berbicara tentang multilateralisme, terutama DK PBB, akan bicara tentang kaitannya dengan negara P5. Realita ketujuh adalah untuk melihat apakah multilateralisme ini mengubah tatanan atau tidak, karena pada konteks ini akan sangat erat dengan nasionalisme dan kebijakan *inward looking*.

Dalam DK PBB ini karena Indonesia bisa memilih mitra untuk *like minded countries* pada isu yang ingin Indonesia berpartisipasi di dalamnya. Perlu diketahui bahwa pertemuan bilateral saja tidak bisa karena aktualisasi kekuatan politiknya tidak terealisasi dengan baik, sehingga diplomasi multilateral dapat menambah kekuatan apabila kita bisa memanfaatkan hal ini untuk menutup keterbatasan. Harus

⁶⁰ Jacob Bercovitch and Allison Houston, "INFLUENCE OF MEDIATOR CHARACTERISTICS AND BEHAVIOR ON THE SUCCESS OF MEDIATION IN INTERNATIONAL RELATIONS," *International Journal of Conflict Management* 4, no. 4 (January 1, 1993): 297–321, <https://doi.org/10.1108/eb022730>.

⁶¹ Michael Haas, "Bridge-Building in International Relations: A Neotraditional Plea*," *International Studies Quarterly* 11, no. 4 (December 1, 1967): 320–38, <https://doi.org/10.2307/3013915>.

ada parameter dalam memilih *like minded countries*, karena semakin banyak negara berpartisipasi dalam proses norma di level multilateral, maka akan kurang solutif dan efektif norma yang dibentuk sehingga harus ada seleksi. Penulis mengajukan dua parameter untuk memastikan kesinambungan diplomasi multilateral bersama *like minded countries* dengan posisi kebijakan luar negeri Indonesia yang telah terestrukturisasi. Pertama, Indonesia membangun parameter terkait apa potensi dan skenario yang bisa muncul dalam situasi yang kritis, optimis, dan oportunistis dari isu yang di bahas. Kedua, Indonesia bisa membangun parameter di mana setiap negara secara sikap Indonesia dapat tetap mempertahankan ide bebas aktif dan dapat bersikap berimbang dan nyaman dalam mengusulkan normanya pada forum multilateral tanpa ada kekhawatiran akan *judgementalism* dari negara mitra tersebut yang bersifat kontra produktif.

Peran Indonesia sebagai negara yang membangun jembatan (*bridge-builder*) sendiri hadir dikarenakan proses yang unik sejak sebelum Indonesia menjadi anggota tidak tetap di DK PBB. Selain itu, Indonesia sebagai negara juga ketika mengambil preferensi peran sebagai *middle power* dalam diplomasi multilateral harus memperhatikan apakah struktur kebijakan luar negeri yang dibangun telah menempatkan ide dan karakter sebagai negara *middle power* dalam hirarki kerangka kebijakannya *vis-a-vis* tataran normatif operasional polugri untuk memastikan fungsionalitas *middle power*⁶².). Justifikasi menurut penulis yang paling masuk akal terkait hal ini adalah bahwa negara *middle power* akan senantiasa termotivasi untuk mengambil tanggung jawab baru yang lebih besar dalam organisasi internasional melalui nilai, strategi, dan kepentingan mereka sendiri dalam mencapai perubahan (*desire and pursuit of change*) dalam sistem internasional.

Niscaya juga, peran *middle power* dapat dilihat bukan dari demonstrasi kekuatan mereka, namun lebih dalam kebijakan luar negeri yang kental akan perilaku ketimbang *measurement* atau pengukuran tingkat kekuatan. Hal ini sendiri dalam konteks Indonesia di DK PBB sejajar dengan apa yang Indonesia lakukan sebelumnya terkait isu keterkaitan antara terorisme dan kejahatan internasional, di mana Indonesia lebih melakukan pendekatan pada peningkatan kapasitas nasional dan tata kelola kebijakan domestik yang preventif dan aktual, ketimbang pada melaksanakan operasi anti terorisme yang mungkin mirip pada operasi *Global War on Terror* yang melibatkan *hard power* nyata yang diterjunkan ke negara – negara di Timur Tengah. Hal ini berarti, bahwa Indonesia terus mendorong pendekatan kooperatif, di mana Indonesia lebih mengedepankan kerja sama yang dapat mengurangi keterbatasan domestik dan meningkatkan kapabilitas nasional melalui kemitraan dengan pihak asing dipandu oleh norma DK PBB ketimbang implementasi operasi yang bersifat transnasional. Berikutnya, *niche* dari diplomasi multilateral *middle power* adalah pendekatan membangun jembatan yang di kombinasikan juga dengan pendekatan unilateral atau bilateral, serta kemampuan untuk memilih kapan untuk terlibat/ melepas dirinya (negara *middle power*) dari proses multilateral.

Diplomasi multilateral bagi *middle power* juga tidaklah melulu tentang bagaimana negara yang berminat untuk membentuk, menetapkan, dan membagikan norma untuk berdiplomasi, namun juga bisa dipandang oleh *middle power* sebagai

⁶² Carl Ungerer, "The 'Middle Power' Concept in Australian Foreign Policy," *Australian Journal of Politics & History* 53, no. 4 (December 1, 2007): 538–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-8497.2007.00473.x>.

level diplomasi yang memberikan ruang bagi para *major power* untuk *balancing* dengan *middle power* pada isu sensitif. Dalam isu Palestina juga, Indonesia tahu betul dan sesama anggota DK PBB lainnya juga mengerti, bahwa isu Palestina menjadi agenda utama 4+1 Indonesia dalam masa keanggotaannya di DK PBB. Prioritas utama yang mudah diketahui sebagai stigma yang ditempelkan ke Indonesia sebagai pembela Palestina di DK PBB memberikan beberapa keuntungan: (1) semua negara sudah tau apa tujuan Indonesia membangun jembatan, dan mereka sudah bisa mempelajari apa yang menjadi kepentingan Indonesia, dan mengetahui bahwasannya solidaritas Indonesia ke Palestina adalah keniscayaan yang dimandatkan secara konstitusional dan bukan sesuatu yang sebatas politik dan agenda anti barat/ sebagainya; (2) Indonesia dalam proses membangun jembatan sudah dapat memetakan respons dan sentimen yang mungkin akan menjadi posisi negara *counterpart* dalam berdiplomasi terkait isu Palestina. Hal ini menurut penulis menjadi salah satu argumen karena apabila lawan bicara kita tidak mengerti betul intensi dan muatan kepentingan kita secara substansi, maka kemungkinan untuk mispersepsi akan semakin besar. Oleh karena itu, peran DK PBB dalam hal ini menjadi forum dialog, dan Indonesia kedepannya bisa memperjuangkan kemerdekaan Palestina sambil secara aktif mengawal agar komunitas internasional tidak melupakan hal ini. Saat di DK PBB tentunya apa yang Indonesia lakukan adalah menyampaikan argumen yang bisa membuka keseimbangan jembatan antar negara di DK PBB untuk terus *recalling* keputusan DK PBB sebelumnya dan agar implementasi *two state solution* dapat dilakukan dengan kemungkinan resonansi yang kuat di forum lain seperti OKI. Indonesia juga terus membangun *link-and-match* yang kuat antara lingkungan eksternal yang sangat sensitif terkait isu teritorial sehingga peran menjadi pembangun jembatan setidaknya menempatkan Indonesia di posisi tawar yang lebih netral.

Pada DK PBB, Indonesia juga mendorong penyelesaian isu melalui kolaborasi multilateral dan bilateral dengan membangun jembatan antara forum multilateral dengan organisasi regional dalam isu keamanan. Indonesia juga mendorong pembangunan jembatan antar negara maju untuk menerbitkan *Presidential Statement* DK PBB terkait serangan teroris di Afghanistan, Iran, Filipina, Selandia Baru, dan Sri Lanka. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi selama menjadi anggota DK PBB untuk membangun jembatan antara kapasitas negara maju dan berkembang dalam mengelola rezim internasional untuk resolusi konflik seperti: (1) 1267 *Sanction Committee* di mana Indonesia menjadi anggota untuk manajemen sanksi yang diberikan kepada afiliasi ISIS dan Al Qaeda, di mana Indonesia memainkan peran untuk membangun jembatan di tengah perbedaan kepentingan negara dalam menempatkan daftar teroris yang cenderung politis dan subjektif parameternya; (2) 1540 *Sanction Committee* di mana Indonesia diberikan kepercayaan menjadi *Chair* untuk mencegah persebaran senjata pemusnah massal oleh aktor bukan negara; dan (3) 1988 *Sanction Committee* untuk urusan Taliban di mana Indonesia kembali ditunjuk menjadi *Chair* serta menjadi *Deputy Chair* pada *Sanction Committee* lain untuk Sudan Selatan dan Irak.

Tujuh Rekomendasi Kebijakan

Beberapa rekomendasi kebijakan yang penulis ajukan berdasarkan penelitian ini dalam kacamata praktisi dan akademisi digabungkan adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia harus melakukan antisipasi dengan menyusun prediksi/ asesmen internal terkait kelanjutan diplomasi multilateral Indonesia sebagai pembangun jembatan pasca era Presiden Joko Widodo. Kementerian Luar Negeri bisa melihat situasi terkini dan prediksi situasional politik luar negeri Indonesia lima tahun kedepan dengan berkaca dari tiga hal: (1) situasi kawasan Indo Pasifik; (2) persepsi dan tuntutan publik terkait arah strategis diplomasi Indonesia; dan (3) kesempatan apakah Indonesia pada lima tahun kedepan norma dan isu apa saja yang akan menjadi perhatian baru komunitas internasional pada spektrum geopolitik, keamanan non tradisional, dan generasi baru konflik antar negara maupun dengan aktor bukan negara.
2. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai institusi penjuror penyelenggara hubungan luar negeri harus melakukan lebih banyak kegiatan diplomasi publik yang mengenalkan peran Indonesia sebagai pembangun jembatan dan prinsip turunan lainnya dari prinsip utama bebas aktif. Diharapkan juga ada sosialisasi kepada akademisi mengenai hal ini agar semua pengkaji studi HI bisa memiliki kesamaan referensi dan pandangan apa yang pemerintah Indonesia maksud dalam diplomasi multilateral *middle power* dalam masa kini.
3. Pemerintah Indonesia saat ini agar memaksimalkan sisa waktu dua tahun lagi untuk kembali meningkatkan kerja sama multilateral dalam isu politik keamanan karena perkembangan dunia saat ini menunjukkan bahwa isu *high politics* masih menjadi perhatian utama. Apabila politik tidak kuat maka ekonomi tidak bisa berjalan begitu juga sebaliknya interdependensi ekonomi akan menentukan situasi politik. Harus ada kerangka kebijakan yang ejal dan dapat digunakan sebagai pedoman dasar posisi Delri dalam forum multilateral ketika membahas isu strategis yang memiliki *divide* atau perpecahan yang kuat antar negara agar narasi Delri mengedepankan peran pembangunan jembatan ini.
4. Mempertimbangkan lagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB pada jangka waktu sepuluh tahun kedepan. Indonesia juga harus tetap mendorong agenda reformasi DK PBB dan melihat apabila ada kesempatan bagi Indonesia menjadi anggota tetap DK PBB dalam jangka panjang apabila perluasan keanggotaan dimungkinkan.
5. Kesempatan bagi Indonesia akan terus ada dan reputasi politik bebas aktif menjadi kunci utama dalam memahami bahwa dunia membutuhkan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu dorong persatuan para aktor penting di masing – masing kawasan selain daripada pendekatan bilateral, GNB, maupun sesama negara ASEAN.
6. Isu Palestina, keamanan siber, kejahatan transnasional, isu krisis kesehatan, dan kerja sama pembangunan kelak akan menjadi bagian penting dalam nexus keamanan dan diplomasi dalam hubungan internasional termasuk di DK PBB kedepan. Indonesia harus siapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan instrumen Peraturan Menteri Luar Negeri terkait untuk memperbaharui struktur unit kerja di Kementerian Luar Negeri kedepan agar tetap tercakup dan mendapat mekanisme koordinasi yang jelas dan terstruktur sambil mendorong semangat reformasi birokrasi.

7. Kesenambungan politik luar negeri Indonesia sebagai pembangun jembatan hanya bisa dicapai apabila Indonesia sadar akan keterbatasan yang mungkin terjadi karena faktor kepemimpinan dan preferensi cara penanganan situasi di kawasan serta penggunaan referensi rezim perdamaian dan keamanan di kawasan sebagai posisi multilateral di DK PBB.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada korelasi positif antara identitas *middle power* Indonesia, bagaimana RKLN terlaksana untuk menembus batasan dan tantangan *middle power*, dan terbuktinya peran pembangun jembatan merupakan konsepsi peran yang tepat bagi Indonesia. Berikut ini adalah tiga hal yang menjadi kesimpulan untuk rekomendasi bagaimana Indonesia bisa mempertahankan kebijakan *middle power* sebagai *bridge builder* di forum DK PBB. Pertama, Indonesia harus mengedepankan bahwa dalam menjaga peran sebagai pembangun jembatan, Indonesia harus peka akan realita yang ada dan terus mencoba mendorong pendekatan yang lebih pragmatis dan memberikan narasi yang lebih netral dibanding narasi yang diberikan oleh *major power* pada isu yang sama. Kedua, membangun jembatan berarti bukan hanya bicara rekonstruksi realita semata di dalam forum, tetapi juga bicara bagaimana bisa memberikan *confidence* untuk semua pihak melalui peran yang di mana Indonesia menjadi *lead* bahwa Indonesia harus terus membangun solidaritas negara berkembang, bahwa aktor di lapisan kedua inilah yang memastikan keberlangsungan multilateralisme di suatu institusi ketika *major power* tersendat. Ketiga, Indonesia diharapkan kembali terus merencanakan aksi nasional dan kerangka domestik yang dapat mendorong solidifikasi prinsip sebagai pembangun jembatan agar terkodifikasi menjadi mandat ketika melangsungkan diplomasi. Karena peran sebagai pembangun jembatan niscaya menjadi turunan politik bebas aktif yang harus dipatuhi oleh semua pemimpin Indonesia, karena Indonesia sudah belajar dari masa yang terlalu pro ke barat pada era Soeharto dan pro ke timur pada era Soekarno. DK PBB sendiri akan senantiasa terus melaksanakan kegiatannya dan Indonesia hingga saat ini harus memaksimalkan undangan – undangan untuk memberikan pandangan di DK PBB. Hal ini sebagai bentuk wujud *norm entrepreneurship* Indonesia yang unik dan tidak dimiliki negara ASEAN lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbondanza, Gabriele. "Whither the Indo-Pacific? Middle Power Strategies from Australia, South Korea and Indonesia." *International Affairs* 98, no. 2 (March 7, 2022): 403–21. <https://doi.org/10.1093/ia/iab231>.
- Aji, M, and Jerry Indrawan. "UNDERSTANDING PEACE STUDIES AS PART OF INTERNATIONAL RELATIONS." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 9 (December 13, 2019): 69. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i3.645>.
- Allen, Susan Hannah, and Amy T. Yuen. "The Politics of Peacekeeping: UN Security Council Oversight Across Peacekeeping Missions." *International Studies Quarterly* 58, no. 1 (2014): 621–32. <https://doi.org/10.1111/isqu.12086>.
- Alvian, Rizky Alif, Ganesh Cintika Putri, and Irfan Ardhani. "Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhoyono Dan Joko Widodo." *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 2 (2018): 151–68. <https://doi.org/10.18196/hi.62112>.
- Anindya, C. "The Evolving Security Policy of Japan and the Adherence to

- Antimilitarism Culture." *Global: Jurnal Politik Internasional* 15, no. 2 (2016).
- Anwar, Dewi Fortuna. "Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific." *International Affairs* 96, no. 1 (January 1, 2020): 111–29. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz223>.
- Bercovitch, Jacob, and Allison Houston. "INFLUENCE OF MEDIATOR CHARACTERISTICS AND BEHAVIOR ON THE SUCCESS OF MEDIATION IN INTERNATIONAL RELATIONS." *International Journal of Conflict Management* 4, no. 4 (January 1, 1993): 297–321. <https://doi.org/10.1108/eb022730>.
- Binder, Martin, and Jonathan Golub. "Civil Conflict and Agenda-Setting Speed in the United Nations Security Council." *International Studies Quarterly* 64, no. 2 (June 1, 2020): 419–30. <https://doi.org/10.1093/isq/sqaa017>.
- Bryman, Alan. "Integrating Quantitative and Qualitative Research: How Is It Done?" *Qualitative Research* 6, no. 1 (February 1, 2006): 97–113. <https://doi.org/10.1177/1468794106058877>.
- CARLSNAES, WALTER. "On Analysing the Dynamics of Foreign Policy Change: A Critique and Reconceptualization." *Cooperation and Conflict* 28, no. 1 (March 1, 1993): 5–30. <https://doi.org/10.1177/0010836793028001001>.
- Collier, David. "Understanding Process Tracing." *PS: Political Science & Politics* 44, no. 4 (2011): 823–30. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S1049096511001429>.
- Cooper, Andrew F. "Testing Middle Power's Collective Action in a World of Diffuse Power." *International Journal* 71, no. 4 (December 1, 2016): 529–44. <https://doi.org/10.1177/0020702016686384>.
- Creswell, J.W. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2012.
- Doyle, M. *Ways of War and Peace, Realism, Liberalism, and Socialism*. New York: Norton & Company, 1997.
- Fifield, Russell H. "Korea: A Study of U. S. Policy in the United Nations. By Leland M. Goodrich. (New York: Council on Foreign Relations, Inc.1956. Pp. Xi, 235. \$3.25.)" *American Political Science Review* 51, no. 2 (1957): 558–59. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S000305540027679X>.
- Glazebrook, G Det. "The Middle Powers in the United Nations System." *International Organization* 1, no. 2 (1947): 307–18. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S0020818300006081>.
- Goldmann, Kjell. "Change and Stability in Foreign Policy: Detente as a Problem of Stabilization." *World Politics* 34, no. 2 (1982): 230–66. <https://doi.org/DOI: 10.2307/2010264>.
- Goodrich, Leland M. "The Maintenance of International Peace and Security." *International Organization* 19, no. 3 (1965): 429–43. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S0020818300012388>.
- Gordon, Eleanor. "Security Sector Reform, Statebuilding and Local Ownership: Securing the State or Its People?" *Journal of Intervention and Statebuilding* 8, no. 2–3 (July 3, 2014): 126–48. <https://doi.org/10.1080/17502977.2014.930219>.
- Ha, Anh Tuan, and Hai Binh Le. "Decoding Vietnam's Multilateral Diplomacy." *East Asia* 39, no. 2 (2022): 161–79. <https://doi.org/10.1007/s12140-021-09375-w>.
- Haas, Michael. "Bridge-Building in International Relations: A Neotraditional Plea*." *International Studies Quarterly* 11, no. 4 (December 1, 1967): 320–38. <https://doi.org/10.2307/3013915>.
- Hamid, M. "Malaysia's Membership at the UN Security Council 2015 - 2016: Successes and Setbacks." *Malaysian Journal of International Relations* 8, no. 1 (2020): 87–103.
- Haryanto, A. "Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran." *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* 4, no. 2 (2014): 17–27.
- Herz, John H. "Idealist Internationalism and the Security Dilemma." *World Politics* 2, no. 2 (1950): 157–80. <https://doi.org/DOI: 10.2307/2009187>.
- Hidayatullah, Nur Luthfi. "Classifying Middle Powers Based on Their Regional and

- Multilateral Roles: Differentiating Middle Power Enforcers, Assemblers and Advocators BT - Proceedings of the Unhas International Conference on Social and Political Science (UICoSP 2017)," 113–17. Atlantis Press, 2017. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/uicosp-17.2017.32>.
- Hill, C. *The Changing Politics of Foreign Policy*. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- Holsti, K.J. *A Pioneer in International Relations Theory, Foreign Policy Analysis, History of International Order and Security Studies*. Vancouver: Springer, 2016.
- . *International Politics, A Framework for Analysis*. London: Allen and Unwin, 1983.
- . *Why Nations Realign: Foreign Policy Restructuring in the Postwar World*. London: Allen and Unwin, 1982.
- Hurd, Douglas. "Foreign Policy and International Security." *The RUSI Journal* 137, no. 6 (December 1, 1992): 1–4. <https://doi.org/10.1080/03071849208445650>.
- Indrawan, Jerry. *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intras Publishing, 2019.
- Johnstone, I. *The Power of Deliberation: International Law, Politics and Organization*. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Jordaan, Eduard. "The Concept of a Middle Power in International Relations: Distinguishing between Emerging and Traditional Middle Powers." *Politikon* 30, no. 1 (May 1, 2003): 165–81. <https://doi.org/10.1080/0258934032000147282>.
- . "The Emerging Middle Power Concept: Time to Say Goodbye?" *South African Journal of International Affairs* 24, no. 3 (July 3, 2017): 395–412. <https://doi.org/10.1080/10220461.2017.1394218>.
- Jose, Hino Samuel, and Sigit Aris Prasetyo. "A Strategic View of Minilateralism: Indonesia, Quad, ASEAN, South Korea, Japan, and Impediment to ASEAN Centrality." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 4, no. 2 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.52617/jikk.v5i2.268>.
- Kalayci, Ridvan. "No Title." *Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences* 21, no. 2 (2019): 533–53.
- Karim, Moch Faisal. "Middle Power, Status-Seeking and Role Conceptions: The Cases of Indonesia and South Korea." *Australian Journal of International Affairs* 72, no. 4 (July 4, 2018): 343–63. <https://doi.org/10.1080/10357718.2018.1443428>.
- Kementerian Luar Negeri. "Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2014 - 2019." Jakarta, 2014.
- Kim, Duyeon. "How to Keep South Korea from Going Nuclear." *Bulletin of the Atomic Scientists* 76, no. 2 (March 3, 2020): 68–75. <https://doi.org/10.1080/00963402.2020.1728966>.
- Kissinger, Henry A. "Domestic Structure and Foreign Policy." *Daedalus* 95, no. 2 (August 1, 1966): 503–29. <http://www.jstor.org/stable/20026982>.
- Kurtz, R. *Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict*. San Diego: Academic Press, 1999.
- Lahiry, Sujit. "Conflict, Peace and Security: An International Relations Perspective with Special Reference to India." *Millennial Asia* 10, no. 1 (April 1, 2019): 76–90. <https://doi.org/10.1177/0976399619825691>.
- MacDonald, S, and J Lemco. *Asia's Rise in the 21st Century*. Santa Barbara: Praeger, 2011.
- Mansbach, R. *The Global Puzzle, Issues and Actors in World Politics*. Boston: Houghton Mifflin, 2000.
- Miall, H. *Emergent Conflict and Peaceful Change*. New York: Palgrave Macmillan, 2017.
- Modelski, G. *A Theory of Foreign Policy*. New York: Praeger, 1962.
- Patience, Allan. "Imagining Middle Powers." *Australian Journal of International Affairs* 68, no. 2 (March 15, 2014): 210–24. <https://doi.org/10.1080/10357718.2013.840557>.

- Roberts, C; Habir, A; Sebastian, L, ed. *Indonesia's Ascent: Power, Leadership, and the Regional Order*. London: Palgrave Macmillan, 2015.
- Rosati, Jerel A. "Cycles in Foreign Policy Restructuring: The Politics of Continuity and Change in US Foreign Policy." In *Foreign Policy Restructuring: How Governments Respond to Global Change*, edited by J Rosati, J Hagan, and M Sampso, 221–61. Colombia: University of South Carolina Press, 1994.
- Rosenfeld, M, and A Sajo. *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Rosyidin, Mohamad. "Regionalism under Challenge: Ideas and Joko Widodo's Foreign Policy towards ASEAN, 2014-2019." *Journal of ASEAN Studies* 8, no. 2 (2020): 147–72. <https://doi.org/10.21512/JAS.V8I2.6596>.
- Setiawan, Asep. "PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP ISU NUKLIR IRAN DI DEWAN KEAMANAN PBB TAHUN 2007-2008." *Global Political Studies Journal* 3 (December 26, 2019). <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v3i2.2622>.
- Singh, Ningthoujam Koiremba, and William Nunes. "Nontraditional Security: Redefining State-Centric Outlook." *Jadavpur Journal of International Relations* 20, no. 1 (June 1, 2016): 102–24. <https://doi.org/10.1177/0973598416658805>.
- Skidmore, David. "Explaining State Responses to International Change: The Structural Sources of Foreign Policy Rigidity and Change." In *Foreign Policy Restructuring: How Governments Respond to Global Change*, edited by J Rosati, J Hagan, and M Sampso, 43–61. Colombia: University of South Carolina Press, 1994.
- Ungerer, Carl. "The 'Middle Power' Concept in Australian Foreign Policy." *Australian Journal of Politics & History* 53, no. 4 (December 1, 2007): 538–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-8497.2007.00473.x>.
- Wendt, Alexander E. "The Agent-Structure Problem in International Relations Theory." *International Organization* 41, no. 3 (1987): 335–70. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S002081830002751X>.